

KUALITAS PELAYANAN TK NEGERI BANGETAYU WETAN

KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Oleh:

Mery Apriana Siregar, Nina Widowati

Departemen Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http:// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Kindergartens are institutions that are responsible for the implementation of Early Childhood Education kindergartens as the spearhead of Educational Implementation, are required to always improve the quality of service. Likewise with the Bangetayu Wetan Kindergarten in Genuk Sub-district, Semarang City as the education provider.

The implementation of Bangetayu Wetan Kindergarten is still experiencing problems in the process of standardizing the implementation of kindergarten From the explanation above, the researcher wants to study: (1) Description of the quality of services of Bangetayu Wetan Kindergarten (2) aspects that support and hinder the quality of service of Bangetayu Wetan Kindergarten. Benefits taken from this study to provide information about the quality of Bangetayu Wetan kindergarten services and aspects that need to be considered in improving the service quality of Bangetayu Wetan Kindergarten. Using qualitative descriptive methods, it was found that the need for understanding of achievement and standardization was needed so that the formation and implementation of activities carried out by the kindergarten institutions became clear. Parents are quite satisfied with the services provided by Wetan because they get enough information and good interaction between parents and kindergarten institutions. Constraints occur in the lack of educators and lack of facilities and infrastructure. For this reason, support is needed from the government, especially in Facilities and Infrastructure to support kindergarten activities.

Keywords: *Quality of Service, Parents, Kindergarten*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran dan pemerintah berusaha untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Pendidikan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kesanggupannya yang dilakukan sejak anak usia dini.

Berdasarkan data, jumlah peserta didik di Kota Semarang yang terlayani hanya sebesar 65.633 anak dari 121.101 penduduk yang berusia 0-6 tahun. Hal ini disebabkan: (1) belum semua orang tua dan masyarakat menyadari pentingnya PAUD, (2) masih terbatasnya jumlah lembaga PAUD,

terutama di daerah-daerah pedesaan, daerah terpencil, dan daerah perbatasan, (3) tidak semua lembaga PAUD yang dapat memberikan layanan bagi anak-anak yang ada disekitarnya, dan (4) terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga PAUD. Jumlah tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2013 di Kota Semarang adalah 2722 guru. Dari jumlah tersebut hanya 845 guru yang memiliki ijazah sarjana. Hal ini seharusnya juga mendapat perhatian dari pemerintah agar program ini benar-benar berjalan sesuai dengan rencana program, sehingga mewujudkan PAUD yang menjangkau masyarakat kurang mampu dan tetap berkualitas.

Peneliti memilih objek penelitian di Kecamatan Genuk. Lembaga PAUD di Kecamatan Genuk terutama lembaga pendidikan TK sebagian besar berstatus atau dikelola oleh swasta, hanya ada 1

TK negeri yaitu TK Negeri Bangetayu Wetan bahkan TK tersebut satu-satunya TK negeri di Kecamatan Genuk.

Kualitas Layanan TK Negeri Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dari sarana dan prasarananya. Berdasarkan hasil observasi peneliti, Sarana dan prasarana TK Negeri Bangetayu Wetan masih perlu ditambah dan diperkaya baik APE (Alat Peraga Edukatif) dalam maupun luar ruangan.

Kualitas layanan TK Negeri Bangetayu belum berjalan dengan optimal juga dikarenakan kuantitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang masih minim. Hal-hal yang sifatnya segera kadang-kadang bisa terabaikan karena kurangnya personil.

Melihat berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan, maka peneliti

tertarik untuk mengangkat suatu penelitian yang berjudul “**Analisis Kualitas Pelayanan TK Negeri Bangetayu wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang**”. Melalui penelitian ini nantinya akan dapat diketahui bagaimana Kualitas Pelayanan TK Negeri Kecamatan Genuk Kota Semarang, sehingga dapat berguna bagi para pendiri, pemilik, maupun pendidik lembaga PAUD dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan lembaganya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kualitas Pelayanan TK Negeri Kecamatan Genuk Kota Semarang serta mengetahui aspek-aspek apa saja yang mendukung dan menghambat Kualitas Pelayanan TK Negeri Kecamatan Genuk Kota Semarang

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selanjutnya menjelaskan bahwa administrasi merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Menurut Dimock, Dimock, dan Fox dalam Keban (2008:5) administrasi publik adalah produk barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi tersebut melihat administrasi publik sebagai kegiatan

ekonomi atau serupa dengan bisnis tetapi khusus dalam menghasilkan barang dan pelayanan publik. Nicholas Henry dalam Pasolong (2011: 8) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Dari beberapa definisi administrasi publik diatas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

2. Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian lain disampaikan oleh Daviddow dan Utal dalam Surjadi (2009:57), menurut mereka pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan. Kemudian menurut Sedarmayanti (2010:243), pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang yang

pada hakekatnya merupakan pelayanan konstitusional yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar semua negara termasuk Indonesia (Nurmandi, 2010:56). Penyelenggaraan pelayanan publik menurut Bab I Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia layanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 sebagai berikut : 1) Transparansi, 2) Akuntabilitas, 3) Kondisional, 4) Partisipatif, 5) Kesamaan hak, dan 6) Keseimbangan

hak dan kewajiban. Dari asas-asas tersebut terlihat bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik diperuntukan kepada semua masyarakat termasuk masyarakat dengan kebutuhan khusus. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang dapat menjangkau semua elemen masyarakat.

3. Kualitas Pelayanan

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat diaktakan baik dan sebaliknya (Pasolong, 2011: 132)

Kualitas pelayanan menurut Sampara (1999:14) dalam Hardiyansyah

(2011:35) yaitu pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan. Barata (2004:37) membagi kualitas pelayanan menjadi dua, yakni kualitas layanan internal dan kualitas layanan eksternal. Kualitas layanan internal berkaitan dengan interaksi jajaran pegawai organisasi/perusahaan dengan berbagai fasilitas yang tersedia, sedangkan kualitas layanan eksternal mengacu pada kualitas yang diberikan kepada pelanggan di luar organisasi.

Pelayanan berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada pelanggan sangat tergantung pada kepuasan pelanggan. Lukman dalam Pasolong (2011:134) menyebut salah satu ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas (prima) sangat tergantung pada tingkat

kepuasan pelanggan yang dilayani. Pendapat tersebut artinya menuju kepada pelayanan eksternal, dari perspektif pelanggan, lebih utama atau lebih

Di dalam Sinambela (2006:6), secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang: 1) Transparan, 2) Akuntabilitas, 3) Kondisional, 4) Partisipatif, 5) Kesamaan Hak Pelayanan, 6) Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Pelayanan. Selanjutnya, jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat

4. Pengertian Pendidikan

Pendidikan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Menurut UU RI No 20 Tahun 2003, satuan pendidikan adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pemerintah menyelenggarakan pendidikan dari tingkat yang paling dasar, yaitu pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi. Berdasarkan berbagai definisi yang menjelaskan tentang pendidikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup guna

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter manusia menjadi lebih bermartabat serta berkualitas.

5. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Menurut pasal 28 UU RI No 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui pendidikan formal, nonformal, dan/ atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal

berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

6. Dimensi Kualitas Layanan Lembaga PAUD

Sebagai lembaga pendidikan yang memberikan produk dalam bentuk jasa, yaitu pendidikan, dan tempat terlaksananya proses pendidikan, maka suatu lembaga PAUD harus mampu memberikan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pemerintah menetapkan standar pendidikan yang khusus bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Peraturan Menteri No 58 Tahun 2009. Standar PAUD merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan

mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok, yaitu: (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan; (2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (3) Standar isi, proses, dan penilaian; dan (4) Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif.

2. Fokus dan Lokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Melihat Kualitas Pelayanan serta aspek-aspek yang mendukung dan menghambat Kualitas Pelayanan di TK Negeri Kecamatan Genuk Kota Semarang. Lokus dari penelitian ini

adalah TK Negeri Kecamatan Genuk Kota Semarang.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap memahami benar pelaksanaan pelayanan TK Negeri Bangetayu wetan yaitu Kepala Bagian PNFI di UPTD kecamatan Genuk dan Orang Tua yang mewakili peserta didik sebagai pihak yang menerima pelayanan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer diperoleh dari wawancara maupun observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti di TK Negeri Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut adalah Peraturan perundang-undangan dan data-data lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)
2. Observasi

6. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

7. Kualitas Data

Teknik yang digunakan untuk menguji data yaitu teknik/triangularisasi data yang artinya teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan data sebagaimana pembandingan data tersebut. Cara yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara mendalam
2. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari wawancara dengan informasi dilapangan.
3. Melakukan konfirmasi hasil yang diperoleh kepada sumber-sumber/informan lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan

Perkembangan yang dirasakan guru dan orang tua terhadap perkembangan anak sangat signifikan mereka tidak saja mulai dari mengenal hal-hal baru sampai mulai pandai membaca dan menulis. Anak-anak semakin aktif dan kreatif terlihat dari kegiatan seperti menggambar, mewarnai, bernyanyi serta aktif mengikuti kegiatan di TK. Anak didik juga sudah mulai bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan seperti biasa berdoa, biasa cuci tangan sebelum makan, biasa merapikan sepatunya di rak sepatu.

Terdapat kesulitan yang dirasakan orang tua dalam hal perkembangan seperti membaca atau menghafalkan sesuatu. Kesulitan lain yang terjadi adalah anak terkadang malas sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari Guru TK.

B. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sangat dibutuhkan dalam memperoleh kualitas layanan TK yang baik. Tenaga pendidik di TK Negeri Bangetayu Wetan masih memiliki tenaga kependidikan yang minim sekali, sehingga tanggung jawab urusan-urusan umum TK dan urusan diluar TK sering sekali terabaikan. Berdasarkan data dari TK Negeri Bangetayu Wetan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga administrasi sudah memenuhi kualifikasi. Kualifikasi untuk tenaga pendidik yaitu harus S1 PAUD dan tenaga administrasi minimal memiliki ijazah SMA.

Dalam meningkatkan kualitas Tenaga Pendidik Lembaga-lembaga pembinaan PAUD dan lembaga terkait di Kecamatan Genuk berupaya melakukan beberapa kegiatan dalam peningkatan kompetensi terutama tenaga pendidik seperti

Pengadaan pelatihan dan mengikuti pendidikan lanjutan untuk tenaga pendidik.

Tenaga Pendidik di TK Negeri Bangetayu Wetan sosok yang sabar, bersih, sopan dan penuh perhatian cermin kepribadian yang diharapkan untuk dalam mendidik anak. Ada kalanya Tenaga Pendidik tidak bisa memberikan perhatian yang dengan baik kepada setiap anak. Perhatian khusus juga dibutuhkan kepada anak yang masih kurang aktif dalam kegiatan di TK. Setiap tugas Tenaga Pendidik tidak hanya terfokus kepada anak saja melainkan bertanggungjawab terhadap perawatan buku, kebersihan setelah pelajaran, menyimpan buku-buku dan mencatat kegiatan apa saja hari ini serta mengadakan rapat dengan lembaga terkait.

C. Standar Isi, Proses, dan Penilaian

1. Komponen Isi

Mencakup kegiatan dan waktu simulasi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu selama

minimal 18 jam, maksimal 30 jam. Kelender pendidikan meliputi minggu efektif, waktu pengasuhan dan pendidikan efektif, hari libur bersifat fleksibel tergantung pada masing-masing satuan pendidikan.

Manajemen kurikulum yang digunakan sudah berbasis tema dan scientific yang sudah melakukan pendekatan terhadap anak secara langsung. Tenaga Pendidik membangun tema yang akan diajarkan setiap harinya atau direncanakan untuk per minggu sekali. Tema-tema ini berasal dari lingkungan dekat TK atau hal-hal yang sifatnya sesekali terjadi.

Bahwa ini juga merupakan bagian visi misi yang disosialisasikan kepada orang tua, anak mempelajari hal-hal dasar yang essensial dari anak itu sendiri. TK juga memberikan pelajaran agama disesuaikan dengan kondisi warga yang mayoritas muslim.

Hal ini sebagai cerminan masyarakat sekitar yang taat beragama. Orang tua menginginkan anaknya mengenal agama sejak usia dini, sehingga ada pedoman-pedoman dan hasanah yang membangun nilai-nilai moral dan spiritual.

Melaksanakan visi dan misi pembinaan anak usia dini tidak terlepas dari tujuan dasar untuk mempersiapkan anak untuk kejenjang selanjutnya mereka lebih mandiri dan bertanggung jawab. Karena cakupan mengembangkan program unggulan terbatas sehingga program yang dilakukan tidak jauh beda.

Terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh setiap lembaga PAUD. Kegiatan dilakukan didalam maupun diluar sekolah. Didalam sekolah dilakukan dengan memberi tambahan 30 menit setelah dua setengah jam waktu

kegiatan harian. Kegiatan ekstrakurikuler dilingkungan TK yang biasanya dilakukan meliputi: Menari, menggambar, mewarnai, BTA (baca tulis Al-qur'an), agama dan drumband

2. Komponen Proses

a. Pembukaan

Setelah pembuatan RPPH, dipersiapkan dahulu kelas untuk menyambut anak didik. RPPH akan diimplementasikan dalam bentuk apa nantinya, sehingga disesuaikan seperti menempel poster, untuk guru piket dalam menyambut anak-anak dan selanjutnya anak didik dibariskan, membaca doa dan lalu masuk kekelas. Dilakukan pemanasan setelah membaca doa seperti kegiatan senam dan bernyanyi untuk melatih fisik motorik anak. Setelah itu memasuki kegiatan inti tentang tema apa yang

akan dilakukan dan ditutup dengan refleksi terhadap kegiatan hari ini.

b. Inti

Yang berisi pilihan-pilihan secara kelompok maupun individual. Anak diberi kesempatan untuk memilih, mengambil, menentukan alat dan kegiatan bermain. Tenaga Pendidik memfasilitasi anak untuk memperoleh pengalaman bermakna melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, membicarakan gambar, mendengar cerita, menyanyi, bersajak pendek, menari menghitung sederhana serta beragam kegiatan multisensoris

Perlu diperhatikan pembagian waktu dalam rencana kegiatan pembinaan setiap harinya. Tenaga Pendidik memajemen waktu sehingga setiap kegiatan baik pembukaan hingga penutup lebih efisien dan efektif. Diberikan

setidaknya jeda waktu untuk setiap kegiatan dan waktu istirahat.

c. Penutup

Berisi membicarakan cerita sederhana yang bermakna bagi anak selain kegiatan konfirmasi dan refleksi diri terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Tenaga Pendidik memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk pujian, dan melakukan perencanaan tindak lanjut bagi anak-anak yang membutuhkan.

3. Komponen Penilaian

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, terprogram dengan cara membuat kesimpulan dari hasil pencatatan harian, riwayat kesehatan, berbagai tingkatan pencapaian perkembangan anak yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Penilaian dilakukan setiap bulan, setiap tiga bulan, sesuai dengan tahap perkembangan anak. Deteksi dini

dilakukan terhadap anak yang memiliki masalah perkembangan sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Tindak lanjut berupa konsultasi atau rujukan apabila dipandang perlu.

D. Standar Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, dan Pembiayaan

1. Kondisi Sarana dan Prasarana

TK Negeri Bangetayu Wetan mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai program dalam peningkatan kualitas pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini walaupun dalam hal sarana dan prasarana masih belum lengkap. Untuk kondisi prasarana kegiatan PAUD terlihat nyaman dan aman, ruangan yang cukup, terletak di tempat yang strategis sehingga mudah untuk dijangkau. Posisi TK idealnya tidak ditempat yang dekat dengan keramaian. Dalam hal ini melalui pengamatan bahwa lingkungan TK sudah cukup aman dan nyaman karena

memiliki halaman yang cukup luas dan pagar yang didirikan supaya tidak semua orang boleh masuk sembarangan.

2. Pelaksanaan Pengelolaan

Pelaksanaan pengelolaan PAUD di Kecamatan Genuk sudah mampu mengimplementasikan manajemen yang berbasis masyarakat indikator dilapangan bahwa:

1. Partisipasi; melakukan rapat dengan orang tua dan menginformasikan keadaan atau kebutuhan dengan membuat group Whatsapp untuk meningkatkan pro aktif orang tua dalam menanggapi
2. Keterbukaan dan akuntabilitas; dapat bertanya langsung dengan lembaga terkait, pendataan terhadap kegiatan PAUD terutama biaya dan kebutuhan yang telah digunakan.

Dalam hal kemitraan, TKN Bangetayu Wetan belum bisa bekerjasama dengan pihak luar dikarenakan TK berstatus negeri. Setiap lembaga PAUD di Kecamatan sudah memiliki kepala yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan PAUD masing-masing. Kegiatan perencanaan dan pengelolaan serta monitoring sudah berjalan dengan aktifnya komite sekolah mengadakan koordinasi antara lembaga PAUD, komite PAUD, UPTD, dan warga masyarakat.

3. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan TK Negeri Bangetayu didapat dari pemerintah berupa BOP (biaya operasional) dan Hibah Sarpras (sarana dan prasarana). Bantuan yang didapat dirasakan masih belum optimal ditunjukkan dengan sarana dan prasarana yang masih belum lengkap. Di TK Negeri Bangetayu

Wetan sudah membebaskan biaya pembangunan dan lainnya seperti seragam gratis karena sudah dibiayai oleh Pemerintah.

Dalam pembiayaan gaji tenaga pendidik sudah sesuai karena Tenaga pendidik sudah berstatus Pegawai Negeri dan mendapatkan tunjangan-tunjangan dari Pemerintah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Standarisasi pelayanan Lembaga TK didasarkan kepada tujuan utama kegiatan TK yaitu kemandirian anak dan kemampuan bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan TK Negeri bangetayu Wetan sudah mampu mewujudkan capaian tersebut dengan adanya kemandirian yang dilakukan setiap PAUD dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan anak usia dini.

2. Orang tua sudah merasakan cukup puas dengan pelayanan lembaga TK. Perkembangan anak sudah sesuai dengan tujuan para orang tua mendaftarkan ke TK
3. TK Negeri Bangetayu Wetan mampu membangun hubungan yang baik terhadap orang tua, kemitraan, dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan menunjang kegiatan pembinaan anak usia dini.
4. Masih terdapat kendala yang dialami TK Negeri Bangetayu Wetan terutama dukungan pemerintah seperti sarana dan prasaran dalam mensukseskan kegiatan pembinaan anak usia dini

B. Aspek Pendukung dan Penghambat

Aspek pendukung:

1. Orang tua merasa puas dan menganggap kendala-kendala yang dialami lembaga-lembaga adalah hal yang wajar sebab orang tua

merasakan keterbukaan lembaga TK dalam pelaksanaan kegiatannya dan ikut dilibatkan dalam proses pelaksanaan kegiatan TK

2. Tenaga Pendidik sudah mengerti problematika dalam pelaksanaan TK terutama dalam pemahaman capaian pelaksanaan kegiatan TK
3. Usaha dalam menciptakan kompetensi yang lebih baik seperti pengajuan sertifikasi, melakukan pelatihan dan program sekolah lanjutan

Aspek Penghambat

1. Kurangnya tenaga kependidikan menyebabkan hal-hal lain banyak yang terabaikan
2. Perkembangan jaman mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga banyak nilai-nilai budaya yang berubah sehingga Tenaga Pendidik berusaha bertahan dan mencoba untuk tetap menanamkan nilai-nilai yang sesuai untuk pengembangan anak didik.
3. Terdapat kekurangan yang dalam sarana dan prasarana dalam hal ini penyediaan alat-alat bermain yang belum lengkap.

4. Dukungan pemerintah dinilai masih belum berjalan optimal dalam hal Saran dan Prasarana

C. Saran

1. Perlunya pemahaman sosialisasi terhadap pentingnya dan tujuan dalam kegiatan pembinaan anak usia dini. Diharapkan dengan ini proses belajar dan faktor-faktor pokok lainnya harus disesuaikan dengan tujuan dasar pembinaan anak usia dini
2. Dukungan dari pemerintah terutama dalam Sarana dan Prasarana dalam menunjang kegiatan TK.
3. Peningkatan kegiatan-kegiatan yang melibatkan Lembaga TK dalam mengukur capaian masing-masing. Misalnya lomba PAUD sehat, lomba baca tulis dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu dan Supriyono, widodo. (2004). *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Afifudin, H dan Beni Ahmad Saebeni. (2009). *Metodologi Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Barata, Atep Adya. (2004). *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Dwiyanto, Agus. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hardiansyah .(2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Joko Subagyo, P. (2006). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Keban, Jeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya Offset.

Muliawan, Jasa Ungguh. (2009). *Manajemen Play group dan Taman Kanak-kanak*. Jogjakarta: Diva Press.

Nurmandi Achmad. (2010). *Manajemen pelayanan publik*, Yogyakarta: PT. Sinergi Visi Utama.

Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Sedarmayanti. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasidan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refka Aditama.

Sinambela, Lijan Poltak. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Singarimbun, Masri, dkk. (2006). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Surjadi. (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama.

Suyanto, Slamet. (2003). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: UNY.

Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra. (2005). *Service, Quality, and satisfaction*. Yogyakarta: Andi.

Usman, Husaini. 2006. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Akasara.

Sumber lain:

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor

63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.

Cerata, Dino. (2007). “*Perlukah Anak diikutkan PAUD?*”. Dalam <http://artikel-pendidikan-guru.blogspot.co.id/2013/05/perlukah-anak-diikutkan-paud.html#> . Diunduh pada 21 Mei pukul 19.46 WIB.